

SINOPSIS

Tata kelola pemerintahan desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan ditekankan dilaksanakan secara optimal. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa ditekankan bertindak transparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaksanaan. Segala kegiatan desa dengan tujuan untuk kemakmuran desa juga harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban. Pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. BPD dapat memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan desa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan model sebagian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan melihat aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa Banyuraden sendiri pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan-peraturan pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat yang sudah dibuat dalam undang-undang, perda, maupun perbup yang ada. Dalam pelaksanaannya sejauh ini masih terdapat kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan itu terus mengupayakan memperbaiki kelemahan tersebut penting untuk dilaksanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Banyuraden secara pokok dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Mengambil aspirasi mulai dari tingkat RT, RW sampai ke tahap atasnya. Dengan partisipasi yang lebih dari masyarakat dan banyak mendapatkan prestasi kegiatan ditingkat daerah maupun pusat menjadikan desa Banyuraden memiliki penafsiran sendiri.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Pemerintah Desa, Dana Desa*